



BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**KABUPATEN
TABALONG**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 425);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);
22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

Dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 5

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2026

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah
2. Rencana Kerja Sekretariat DPRD
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah
4. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia
8. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Kerja Dinas Kesehatan
12. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Kerja Dinas Sosial
18. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Kerja Dinas Perhubungan
21. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan
dan Holtikultura
24. Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan

27. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Kerja Kecamatan Tanjung
30. Rencana Kerja Kecamatan Murung pudak
31. Rencana Kerja Kecamatan Tanta
32. Rencana Kerja Kecamatan Muara Harus
33. Rencana Kerja Kecamatan Banua Lawas
34. Rencana Kerja Kecamatan Kelua
35. Rencana Kerja Kecamatan Pugaan
36. Rencana Kerja Kecamatan Jaro
37. Rencana Kerja Kecamatan Muara Uya
38. Rencana Kerja Kecamatan Haruai
39. Rencana Kerja Kecamatan Upau
40. Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara
41. Rencana Kerja Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim



BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, serta dengan Taufik dan Hidayah-Nya kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026 akan digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) berperan juga sebagai alat kendali, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

Dalam penyusunan Renja ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam menyusun laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan/program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Tanjung, 27 September 2025

Kepala Dinas,



ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780910 199711 1 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	8
D. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu.....	12
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	12
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	41
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD.....	47
D. Review Terhadap Rancangan Awal RPKD.....	51
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	66
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.....	69
A. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	69
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	69
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	79
BAB V Penutup	93
A. Catatan penting dalam penyusunan Renja.....	93
B. Kaidah-kaidah pelaksanaan	93
C. Rencana tindak lanjut.....	94



DAFTAR TABEL

	Hal
1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	14
2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	42
3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.....	52
4. Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.....	68
5. Prioritas dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	70
6. Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	71
7. Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	71
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	72
9. Sasaran, Program dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	74
10. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.....	80



DAFTAR GAMBAR

	Hal
1. Bagan Alur Rancangan renja OPD Kabupaten/Kota.....	2
2. Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran.....	4
3. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	4



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Rennstra) DP3AP2KB dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender, ramah anak, serta pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program kependudukan dan keluarga berencana. Permasalahan yang masih menjadi tantangan saat ini antara lain masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, ketimpangan gender, pernikahan anak, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang berkualitas.

Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) ini didasarkan pada kebutuhan untuk merumuskan program dan kegiatan prioritas yang responsif terhadap isu-isu strategis, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah, seperti penguatan perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kesetaraan gender, penguatan ketahanan keluarga, serta pencapaian target-target dalam program Keluarga Berencana.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan akan tercapai peningkatan kinerja dan pelayanan yang lebih baik, terarah, efektif, dan efisien serta keselarasan antara program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan daerah.

1) Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tala mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tabalong yang mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepada Daerah sesuai Peraturan Bupati Tabalong No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

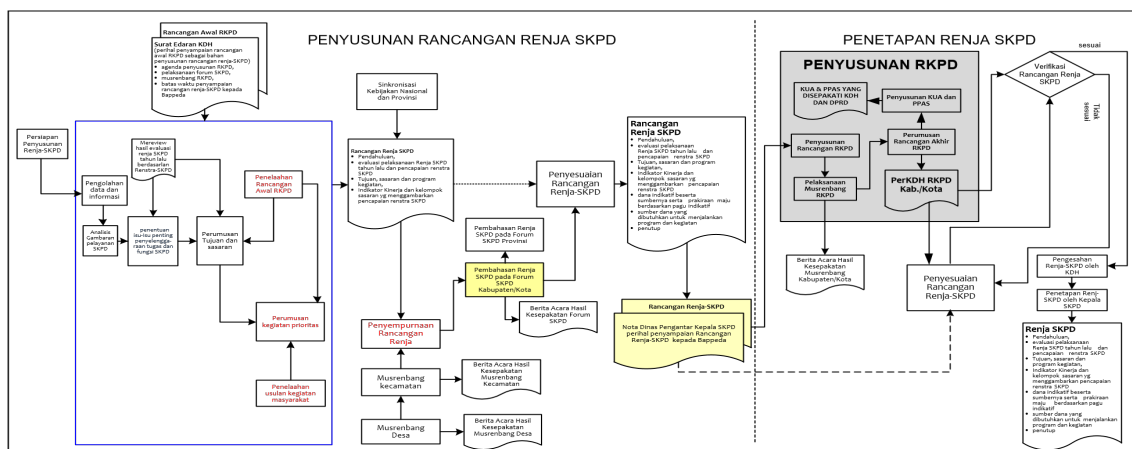
2) Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.

Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- Pembentukan Tim Penyusun Renja
- Orientasi mengenai Renja
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

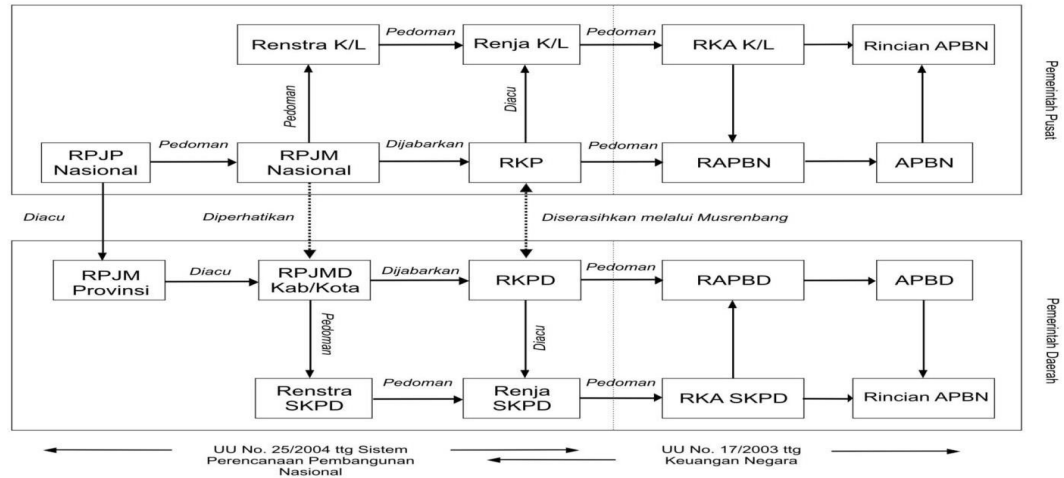
- Pengolahan data dan informasi;
- Analisis gambaran pelayanan OPD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- Pembahasan forum OPD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

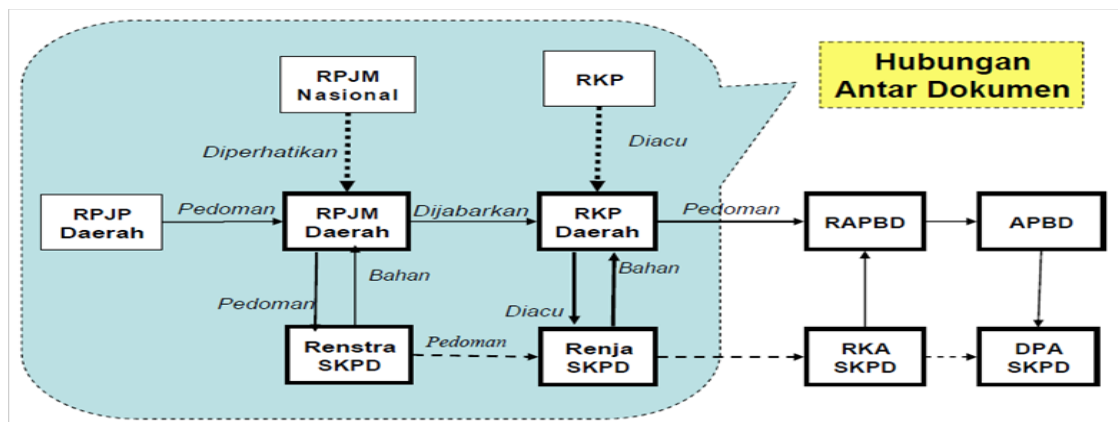
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

3) Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.3

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Pekerjaan Terburuk Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/ Kota Layak Anak;



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 109);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 41);



31. Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 04);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari pembuatan Rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong untuk satu tahun anggaran;
2. Memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan dalam jangka satu tahun depan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan :

Tujuan dari pembuatan rencana kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman / acuan dalam penyusunan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026.

D. Sistematika Penulisan

Rancangan akhir rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/kota, serta tidak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarak Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan perkiraan capaian Tahun 2025, selanjutnya realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jenis Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

C. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat daerah provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;



3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi daerah, terhadap capaian program nasional/internasional. Seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
 4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Berisikan uraian Review terhadap rancangan awal RKPD berdasarkan kepada pagu Renstra, dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang didalamnya sudah termasuk usulan program dan kegiatan Musrenbang.
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Berisikan tentang Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 yang diusulkan melalui Musrenbang melalui aplikasi SIPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

- C. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 dengan menyertai penjelasan sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.



-
- B. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
 - C. Rencana tindak lanjut pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA SKPD.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s/d Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun berjalan).

Total Pagu Anggaran Setelah Perubahan Anggaran Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong yaitu sebesar Rp. 18.877.981.792,- dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 16.308.240.405 atau 86,39% meningkat dibanding realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 13.901.181.031 atau 84,37% dan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 9.619.034.326 atau 84,45%.

Secara umum tidak semua anggaran tahun 2024 dapat direalisasikan secara maksimal, hal tersebut disebabkan antara lain:

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah secara fisik capaian kegiatan sudah 100 %, tetapi capaian realisasi anggaran 79,13% (realisasi Rp. 10.540.541,- dari pagu Rp. 13.320.000,-) hal tersebut dikarenakan paket pakaian dinas yang dianggarkan sebanyak 40 paket sementara jumlah ASN 21 orang, PPPK sebanyak 1 orang dan tenaga kontrak sebanyak 14 orang dengan total keseluruhan sebanyak 36 orang sehingga ada silva pada belanja tersebut.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp. 627.486.530,- dari pagu Rp. 789.535.769,- atau (79,48%). Hal tersebut di karenakan adanya 2 (dua) orang tenaga Non ASN yang mengundurkan diri sehingga anggaran yang tersedia tidak dapat terealisasi. Serta adanya silva pada belanja makan minum rapat dan tamu yang tidak terlaksana.
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp. 289.090.839,- dari pagu Rp. 415.653.301,- atau 69,55%. Hal tersebut di karenakan adanya silva pada belanja pemeliharaan dan bbm baik itu untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, dimana anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan.
4. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/ kota dengan realisasi sebesar Rp. 163.854.110,- dari pagu Rp. 218.458.024 atau 75,00%. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan perjalanan dinas diperuntukkan untuk mengikuti kegiatan Benchmarking Tim Percepatan Penurunan Stunting ke Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kegiatan Kaji tiru Inovator Smart City ke Bandung tidak dapat dilaksanakan karena bertepatan



dengan penilaian/ penginputan Penganugerahan Parahita Eka Praya (Penilaian PPE) dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim teknis Anggaran Responsive Gender (ARG).

5. Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan realisasi sebesar Rp. 168.924.618,- dari pagu Rp. 222.348.327,- atau 75,97%. Hal tersebut dikarenakan realisasi tergantung pada jumlah kasus yang masuk dan sesuai dengan kebutuhan korban, kasus yang masuk tidak bisa di prediksi serta penggunaan anggaran hanya dapat digunakan untuk layanan korban tidak bisa dialihkan untuk kegiatan sosialisasi maupun belanja modal lainnya.
6. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan realisasi sebesar Rp. 1.190.159.873,- dari pagu Rp. 1.571.255.522,- atau 75,75%. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan volume harga sewa Gedung tempat pertemuan di DPA dan dilapangan

Sementara total pagu setelah perubahan anggaran Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong yaitu sebesar Rp. 17.023.423.246,- dengan realisasi anggaran sampai dengan 27 September 2025 yaitu sebesar Rp. 8.622.370.634,- atau 50,65%, hal tersebut disebabkan :

1. Proses pengadaan atau pelaksanaan kegiatan menyesuaikan Rancangan Anggaran Kas (RAK), yaitu beberapa kegiatan dilaksanakan pada triwulan IV;
2. Beberapa sub kegiatan seperti pengadaan mebel dan pengadaan peralatan mesin lainnya masih dalam proses pengadaan (Proses E-Katalog);
3. Kegiatan khusus untuk layanan korban baik itu korban perempuan dan korban anak hanya dapat direalisasikan berdasarkan kebutuhan korban.



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase ARG Pada Belanja APBD	20%	25%	52,38%	100%	20%	20%	-	
		Persentase SKPD yang Responsif Gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	
		IDG	75,12%	75,12%	72,54%	96,56%	75,12	75,12	-	
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Responsif Gender	41 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	100%	41 SKPD	-	-	
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.	-	42	41	100%	-	41	-	Sub Kegiatan & Indikator Ini sudah tidak digunakan lg pada tahun 205



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	-	-	-	-	70 Orang	70	100%	Sub Kegiatan & Indikator ini baru digunakan di tahun 2025 sehingga tdk ada capaian untuk tahun 2024
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD Kab/Kota yang mndapatkan pendampingan	91 Lembaga	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan thn 2026
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	30%	30%	26,27%	87,56%	30%	26,27%	87,27%	-
		Jumlah Desa Sadar Hukum Kabupaten/Kota	60 Desa	60 Desa	60 Desa	100%	60 Desa	60 Desa	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
		Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang di Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	Target sudah tercapai
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	5 lembaga	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	160 Orang	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n pada Tahun 2026
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	160 Orang	160 Orang	100%	140 Orang	140 Orang	100%	Target sudah tercapai pada Triwulan III
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	100%	Pelaksanaan Kegiatan Menunggu SK Bupati Tabalong
2.08.02.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	160 Orang	-	-	-	-	-	-	Sub kegiatan dan indikator ini digunakan pada



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
										tahun 2026
2.08.02.2.03.0008	Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Sub kegiatan & indikator ini digunakan Tahun 2026
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Terselamatkan dan Terselamatkan Penangannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan perjanjian bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
										Ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	15 Orang	16 Orang	100%	14 Orang	20 Orang	100%	Capaian berdasarkan Kasus yang masuk
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Layanan	15 Layanan	16 Layanan	100%	14 Layanan	14 Layanan	100%	Layanan diberikan sesuai kasus yang masuk
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah Terpenuhi
2.08.03.2.03.0007	Pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	40 Orang	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada tahun 2026
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		88,06%	86,1	86,47	100%	-	86,47%	100%	-
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah tercapai



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	-
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	Jumlah pengambilan kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	12 Kecamatan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	120 Orang	120 Orang	100%	180 Orang	180 Orang	100%	Target sudah Terpenuhi
2.08.04.2.02.0007	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Lembaga	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	-	-	-	-
2.08.05.2.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Kegiatan dilaksanakan pada Tw 4



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	Tahun 2025 Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Utama	Utama	-	-	-	-	-	-
2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	-	203 Organisasi	203 Organisasi	100%	203 Organisasi	203 Organisasi	100%	Target sudah tercapai
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi	12 Lembaga	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								& Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	240 Orang	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
										Tahun 2026
2.08.06.2.02.0008	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Anak	67,25 Indeks	68,03 Indeks	-	-	-	-	-	-
		Persentase Anak Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pembentukan PATBM	12 Kali	100%	100%	100%				
2.08.07.2.01.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini ada pada



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
										tahun 2024 sdgkn Thn 2025 sudah tdk digunakan lagi
2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM yang Memperoleh Advokasi dan Pendampingan dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA	-	390 Orang	390 Orang	100%	383 Orang	383 Orang	100%	Target sudah tercapai
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
2.08.07.2.02	Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.07.2.02.0005	Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45 Orang	45 Orang	100%	45 Orang	32 Orang	100%	Capaian berdasarkan Kasus yang masuk
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	-	45 Layanan	45 Layanan	100%	45 Layanan	32 Layanan	100%	Layanan diberikan sesuai kasus yang masuk
2.08.07.2.02.006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	-	45 Layanan	45 Layanan	100%	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada tahun 2024
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Korban Tingkat Kabupaten/Kota	47 Orang	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
										n pada Tahun 2026
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
2.08.07.2.03	Peningkatan Kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penenangan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	-	143 Orang	129 Orang	90,20%	90 Orang	90 Orang	100%	Target sudah Tercapai
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,36%	1,45%	1,32%	91,03%	-	-	-	-
		Indeks Pembangunan Keluarga	67	60,44	67,10%	111,019%	67,10	67,10	100%	-
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)	29	32	12,6%	39,375%	14,8	14,8	14,8	-
		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR Per WUS Usia 15-49 Tahun)	2,21	2,16	1,54%	71,29%	2,18	2,18	100%	-
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk	1 SSK	1 SSK	1 SSK	100%	1 SSK	1 SSK	100%	-
		Rapat/ Pertemuan Program Bangsa Kencana	10 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jejaring SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	1 SSK	1 SSK	1 SSK	100%	1 SSK	1 SSK	100%	Target sudah Tercapai
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	10 Kegiatan	-	-	-	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100%	Target sudah Tercapai
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	2 Dokumen	0	0	Sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan krm sub kegiatan baru pada saat perubahan tahun 2025
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan usia Perkawinan	35 Orang	105 Orang	105 Orang	100%	105 Orang	105 Orang	100%	-
		Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Target sudah Tercapai
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%	Target sudah Tercapai
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangsa Kencana	12 Laporan	-	-	-	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2026
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-	Sub Kegiatan & Indikator ini digunakan pada Tahun 2024



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	Target sudah tercapai
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah tercapai
2.14.03	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	14%	20%	13,58%	67,9%	14%	14%	100%	-
		Cakupan Peserta KB yang Aktif	82,3%	82,28%	79,32%	96,40%	82,3%	82,3%	100%	-
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	82,3%	82,28%	79,32%	96,40%	79,50%	79,50%	100%	-
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	7,58%	7,57%	4,79%	63,27%	4,34%	4,34%	100%	-
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	90%	83,36%	92,62%	-	-	-	-
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	50 Organisasi	30 Organisasi	60%	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	Target sudah Tercapai
2.14.03.2.01.0012	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana	12 Unit	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	12 Unit	0	0	Kegiatan dilaksana



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	Budaya Lokal (DAK Non Fisik BOKB-KB)	(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan								kan pada Triwulan 4
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	Sub kegiatan ini hanya dilaksanakan pada Tahun 2024
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-	10 Laporan	3 Laporan	30%	10 Laporan	8 Laporan	80 %	Sisa kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 4
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	12 Laporan	8 Laporan	66,66%	10 Laporan	8 Laporan	80 %	Sisa kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan 4
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-	Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
										Tahun 2024
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Target sudah Terpenuhi
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB	Persentase PPKBD yang Aktif	100%	95,4%	95,4%	100%	100%	100%	-	-
		Persentase Sub PPKBD Aktif	100%	66,9%	99,74%	100%	100%	100%	-	-
2.14.03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	890 Orang	890 Orang	888 Orang	99,77%	893 Orang	893 Orang	100%	Target sudah Terpenuhi
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KB Aktif	82,25%	81,80%	77,74%	95,03%	82,25%	82,25%	-	-
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	24 Laporan	12 Laporan	50%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Target sudah Terpenuhi
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	952 Orang	1.500 Orang	1.500 Orang	100%	510 Orang	588 Orang	100%	Target sudah tercapai



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	-	50 Unit	50 Unit	100%	2 Unit	1 Unit	50%	Akan dilaksanakan pada triwulan 4
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Laporan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%	Akan dilaksanakan pada triwulan 4
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Persentase Akseptor Pada Kampung KB	82,25%	81,80%	80,56%	98,48%	81,80%	81,80%	100%	-
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	7 Organisasi	50 Organisasi	40 Organisasi	80%	5 Organisasi	0i	100%	Kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan 4
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung KB	18 Kampung KB	18 Kampung KB	100%	52 Kampung	52 Kampung	100%	Target Tercapai sesuai Rencana



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.14.03.2.04.002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	-	-	Kegiatan ini hanya dilaksanakan pada Tahun 2024
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)	80%	80%	89,61%	100%	80%	80%	100%	-
		Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	92%	92%	92,02%	100%	92%	92%	100%	-
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKB yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
		Persentase BKR yang Aktif	100%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	-
		Persentase BKL yang Aktif	100%	80%	80%	100%	80%	80%	100%	-
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK Non Fisik BOKB-KB)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-	25 Unit	25 Unit	100%	10 Unit	10 Unit	100%	Kegiatan tercapai sesuai dengan target
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	-	-	-	Kegiatan ini hanya dilaksanakan



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS)	BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Keluarga/UPPKS)								kan pada Tahun 2024
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Dunia Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	Target Tercapai sesuai Rencana
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%	-
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Target Tercapai sesuai Rencana
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	Kegiatan Hanya dilaksanakan pada Tahun 2026



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kategori SAKIP	A	A	BB	100%	A	A	100%	-
		Nilai SAKIP	80,00%	80%	78,55%	98,18%	-	-	-	-
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	14 Dokumen	80	78,55	98,18%	-	-	-	-
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	14 Dokumen	11 Dokumen	100%	Capaian sesuai dengan Target per triwulan
2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	3 Dokumen	100%	Capaian Sesuai dengan target per triwulan
2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sekoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	-	-	-	4 Data	4 Data	100%	Capaian Sesuai dengan target per triwulan
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Laporan	Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/Bulan	308 Orang/bulan	308 Orang/bulan	100%	30 Orang/ Bulan	30 Orang/ Bulan	100%	ASN dan PPPK berjumlah 27 orang
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	16 Paket	3 Paket	20%	Sedang dalam Proses Pengadaan
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	10 Paket	4 Paket	40%	Realisasi Kegiatan menyesuaikan kebutuhan dilapangan
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 laporan	90 laporan	100%	75 Laporan	21 Laporan	28%	Menyesuaikan Kebutuhan
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	-	-	-	1 Paket	0	0	Sedang dalam Proses Belanja/ Prose E-Kataloq
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Ppenunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	24 Unit	0	0	Sedang dalam Proses Pengada an
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	6 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	31 Unit	0	0	Sedang dalam Proses Pengada an
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%	Target tercapai sesuai Rencana



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian		Catatan
				Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan Renstra SKPD s/d dengan Tahun 2025		
								Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)*100	8	9	10=(9/4)*100	11
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	9 Laporan	75%	Target tercapai sesuai Rencana
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Alat dan Perlengkapan Kantor yang dilakukan Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 Unit	33 Unit	33 Unit	100%	47 Unit	28 Unit	59,57%	Pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dilapangan
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	52 Unit	44 Unit	33 Unit	75%	48 Unit	37 Unit	77,08%	Pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dilapangan
2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Kantor Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	Target sudah tercapai sesuai rencana



B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Memperhatikan hasil analisis Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari capaian sasaran maupun indikator yang menjadi target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dari 5 sasaran strategis dan 12 indikator sasaran dengan tingkat capaian sebagai berikut:

1. Capaian >100% Sangat Baik (A): 4 indikator kinerja sasaran
2. Capaian 76%-100% Baik (B): 6 indikator kinerja sasaran
3. Capaian 56%-75% Cukup (C): 1 indikator kinerja sasaran
4. Capaian < 55% Kurang (K): 1 indikator kinerja sasaran

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, baik dari sisi manajemen dan pengelolaan anggaran diperlukan pencermatan yang lebih baik.

Penataan terhadap perencanaan program dan kegiatan yang mengarah pada tugas pokok dan fungsi terutama pada peningkatan kualitas hidup perempuan yang berkeadilan gender dengan indikator IPG dan IDG, peningkatan kesertaan KB, peningkatan ketahanan keluarga, penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta pencapaian yang mendukung Kabupaten Layak Anak tetap menjadi prioritas utama.

Namun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diupayakan perbaikannya. Dari sisi manajemen dan pengelolaan anggaran diperlukan pencermatan yang lebih baik. Penataan terhadap perencanaan program dan kegiatan yang mengarah pada tugas pokok dan fungsi terutama pada peningkatan kesertaan KB, peningkatan ketahanan keluarga, penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan anak, serta pencapaian yang mendukung Kabupaten Layak Anak tetap menjadi prioritas utama.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD akan membaik apabila didukung oleh :

- SDM yang berkualitas
- Pegawai yang cukup
- Sarana dan Prasarana yang lengkap

Adapun hambatan yang terjadi:

- Masih kurangnya tenaga PNS (Staf/Pelaksana) pada masing-masing bidang
- Rusaknya peralatan pada saat kegiatan sedang berjalan.
- Pemadaman Listrik pada saat kegiatan berlangsung.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Tabalong

NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase ARG pada Belanja APBD	16	16	20	25	30%	20%	4	4	3,41	18	52,34%	20%	20%	
2.	Persentase SKPD yang Responsif Gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93,33%	52,4%	90,5%	100%	100%	100%	100%	
3.	IDG	71,64	72,51	73,38	74,25	75,12	75,12	72,30	73,40	74,65	74,60	72,54%	75,12	75,12	
4.	Jumlah SKPD yang Responsive Gender	30 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	30 SKPD	22 SKPD	42 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	41 SKPD	
5.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif	30%	30%	30%	30%	30%	30%	24,14%	26,67%	26,67%	23,33%	26,27%	30%	30%	
6.	Jumlah Desa Sadar Hukum	12 Desa	24 Desa	24 Desa	48 Desa	60 Desa	60 Desa	12 Desa	24 Desa	24 Desa	48 Desa	60 Desa	60 Desa	60 Desa	
7.	Persentase Angkatan Kerja Perempuan yang Mendapatkan Advokasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	IPG	85,34	85,53	85,72	85,91	86,1	86,06	85,43	85,34	85,48	86,06	86,47	86,06	86,06	
10.	Persentase Peningkatan Kualitas Hidup keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11.	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Pelayanan PUSPAGA	3	5	7	10	10	10	3	5	4	6	12	10	10	
12.	Persentase SKPD yang Mempunyai Data Terpilah Gender dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13.	Jumlah SKPD yang Membuat Data Terpilah Gender dan Anak	15 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	15 SKPD	15 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	
14.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
15.	Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang ditindaklanjuti dan atau diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Persentase Penanganan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17.	Persentase Penanganan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Tdk ada Evaluasi	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
19.	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
20.	Persentase Kelurahan/ Desa Layak Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21.	Indeks Perlindungan Anak	-	68	68,01	68,02	68,03	-	-	-	-	-	-	-	-	



NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22.	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23.	Pencegahan Perkawinan Usia Anak	9	21	33	45	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Sosialisasi dan Pembentukan PATBM	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	12	12	12	
25.	Persentase Kasus Kekerasan Anak yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,48%	1,47%	1,46%	1,45%	1,44%	1,36%	1,5%	1,40%	1,73%	1,37%	1,32%	1,36%	1,36%	
28.	Indeks Pembangunan Keluarga	-	58,2	60,32	60,44	64,55	67	-	53,42	53,42	66,24	67	67	67	
29.	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Sfcific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	28	34	32	29	29	-	-	41,3	29,37	12,6	29	29	
30.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR Per WUS Usia 15-49 Tahun)	-	2,23	2,19	2,16	2,12	2,21	-	2,46	2,37	2,23	1,54	2,21	2,21	
31.	Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) terbentuk	-	-	3	3	3	1	-	-	1	1	1	1	1	
32.	Rapat/ Pertemuan Program Bangsa Kencana	-	3	6	8	8	10	-	3	6	8	10	10	10	
33.	Jumlah Anak Sekolah yang Memahami Manfaat Pendewasaan usia Perkawinan	-	90	90	90	90	35	-	35	35	35	105	35	35	
34.	Persentase Pelaporan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
35.	Persentase Pencapaian Peserta KB MKJP	13%	14,50%	15,25%	17,50%	20%	14%	13,92%	13,07%	13,25%	13,50%	13,58%	14%	14%	
36.	Cakupan Peserta KB yang Aktif	81,97%	82,05%	82,11%	82,19%	82,28%	82,30%	80,89%	79,12%	79,22%	79,30%	79,32%	82,30%	82,30%	
37.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	-	82,05%	82,11%	82,19%	82,28%	82,30%	-	79,12%	79,22%	79,26%	79,32%	82,30%	82,30%	
38.	Persentase UPPKS yang Aktif	75%	80%	82%	87%	90%	90%		80%		87,80%	83,36%	90%	90%	
39.	Persentase PPKBD yang Aktif	80,2%	84%	87,8%	91,6%	95,4%	100%		100%	84%	100%	95,4%	100%	100%	
40.	Persentase Sub PPKBD Aktif	60,3%	61,2%	62,3%	64,1%	66,9%	100%		100%	61,20%	100%	99,74%	100%	100%	
41.	Persentase KB Aktif	80,27%	80,29%	80,30%	80,56%	81,80%	82,00%		79,12%		79,3%	77,74%	82,00%	82,00%	
42.	Persentase Akseptor Pada Kampung KB	-	80,29 %	80,30%	80,56%	81,80%	82,25%		79%		81,31%	80,56%	82,25%	82,25%	
43.	Cakupan Anggota Bina Keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, BKL)	72,75%	73,80%	75,83%	77,90%	80%	80%	84,00%	81,83%	94,32%	78,65%	89,61%	80%	80%	
44.	Cakupan Anggota UPPKS yang ber-KB	-	91,45%	91,60%	91,75%	92%	92%	91,41%	89,70%	71,49%	91,89%	92,02%	92%	92%	
45.	Persentase BKB yang Aktif	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	95,04%	73,57%	100%	100%	100%	
46.	Persentase BKR yang Aktif	-	54%	60,3%	69%	80%	100%	-	100%	84,04%	61,06%	80%	100%	100%	
47.	Persentase BKL yang Aktif	-	65%	73%	84%	97%	100%	-	100%	79,31%	54,87%	80%	100%	100%	
48.	Persentase Kelompok UPPKS yang Aktif	75%	80%	82%	87%	90%	90%	-	80%	80%	87,80%	90%	90%	90%	
49.	Kategori SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	A	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	
50.	Nilai SAKIP	76	77	78	79	80	80	75,00	77,48	77,13	77,95	78,55%	80	80	



NO	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian						Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
51.	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Realisasi Kinerja	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	14 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	14 Dok	14 Dok	
52.	Laporan Keuangan diselesaikan Tepat Waktu	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
53.	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
54.	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
55.	Persentase Kepuasan Masyarakat dan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
56.	Persentase Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	



C. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Analisa tingkat kinerja pelayanan menurut bidang layanan :

a. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup, peran, dan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan. Program utamanya meliputi :

- 1) Peningkatan kapasitas dan kepemimpinan perempuan dalam politik, ekonomi, dan sosial;
- 2) Peningkatan peran perempuan dalam usaha ekonomi produktif, misalnya melalui pelatihan keterampilan perempuan;
- 3) Penguatan kelembagaan dan jaringan organisasi perempuan;
- 4) Pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Bidang ini bertugas menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta pelanggaran hak asasi. Fokus utamanya meliputi :

- 1) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA);
- 2) Penguatan sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
- 3) Penguatan Forum Anak Daerah sebagai pelopor dan pelapor;
- 4) Pembentukan Gugus Tugas PPA di Tingkat Kecamatan;
- 5) Menuju Kabupaten Layak Anak;

c. UPTD PPA

Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA terdiri dari beberapa jenis kasus diantaranya ; kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus kekerasan terhadap perempuan, Kasus kekerasan terhadap anak, kasus pelecehan seksual, hak asuh anak, pengurusan pendidikan dan anak, meliputi :

- 1) Penanganan korban kekerasan dan pendampingan psikologis, hukum, medis dan sosial;
- 2) Pengelolaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
- 3) Fasilitasi koordinasi lintas sektor (Polres, RSUD, LBH);
- 4) Pelayanan Rujukan dan Rehabilitasi;
- 5) Pelayanan Penanganan Kasus.



d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kinerja Pelayanan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik)/ Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), sebagai berikut :

- 1) Operasional Balai Penyuluhan KB, Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan, Operasional PPKS di Balai Penyuluhan KB;
- 2) Operasional Pelayanan KB, Operasional Distribusi Alkon, Operasional Penggerakan Pelayanan (IUD, Implan, MOW dan MOP), Operasional Pencabutan Implan. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fayankes;
- 3) Penurunan Stunting, Operasional Pendampingan Sasaran Catin Keluarga Berisiko dan Balita Stunting, Operasional Pencatatan Hasil Pemantauan Pendampingan Sasaran Berisiko Stunting dan Mini Lokakarya Kecamatan.
- 4) Operasional Pelaksanaan KIE, Operasional Kader KB dan Dukungan Media KIE.
- 5) Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD);

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga

Kinerja Pelayanan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga yang bersumber dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK Non Fisik) / Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
- 2) Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)
- 3) Operasional Penggerakan di Kampung KB;
- 4) Operasional Pokja Kampung KB;
- 5) Operasional Penguatan Kampung KB di Tingkat Kabupaten/ Kota;
- 6) Pemutakhiran Data.
- 7) Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fayankes.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

a) Permasalahan

Dalam melaksanakan kegiatan pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentunya ditemukan permasalahan-permasalahan yang perlu dipecahkan antara lain :

1. Permasalahan yang terjadi pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu :



- a. belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, yang disebabkan oleh masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen dan negosiasi, belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif, belum optimalnya partisipasi politik perempuan, serta belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan dan masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual, maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.
 - b. belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak, keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan, belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini, serta belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan.
2. Permasalahan yang terjadi pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu :
- a. belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan serta masih adanya pernikahan usia dini.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana melaksanakan tugasnya meliputi 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Anak, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Sistem Data Informasi Keluarga, mencakup 12 Kecamatan serta 26 PKB/PLKB di 131 Desa/Kelurahan.

b) Hambatan

- 1) Status Kepegawaian dan Kompetensi layanan di UPTD PPA yang masih belum memadai untuk menjamin keberlangsungan pelayanan;
- 2) Sarana dan Prasarana untuk memberikan layanan yang optimal bagi pengguna manfaat masih kurang memadai;



3. Dampak terhadap pencapaian prioritas pembangunan, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti *SDGs (Sustainable Development Goals)*;

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berperan mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan SDGs yaitu tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera, (5) Kesetaraan Gender dan (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh.

Tujuan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diwujudkan melalui program/kegiatan/sub kegiatan sejalan dengan pencapaian tujuan SDGs.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah suatu bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan APE Kategori Madya diperoleh pada Tahun 2021 untuk penilaian Tahun 2020. Pada Tahun 2023 mengalami penurunan dengan meraih kategori Pratama, hal ini disebabkan belum optimalnya komitmen dan pemahaman dari aparat pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) serta belum terpenuhinya Indikator pelaksanaan PUG dilihat dari aspek kelembagaan dan implementasi pra syarat APE.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

a) Tantangan

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- 3) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan dalam Ruma Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Penanganan kasus kekerasan masih terhambat ego sektoral, belum terkoordinirnya keseluruhan lembaga pemberi layanan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan yang disediakan, dan belum ada regulasi tingkat daerah yang mendukung;



- 5) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksuan dan penipuan;
- 6) Pemanfaatan lahan untuk ruang bermain anak; dan
- 7) Peningkatan kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan KB Pria.

b) Peluang

- 1) Adanya UPTD PPA Kabupaten Tabalong sebagai unit layanan teknis yang menyelenggarakan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjalankan fungsi menerima pengaduan masyarakat, menjangkau korban, menyediakan tempat penampungan sementara, memberikan mediasi dan mendampingi korban;
- 2) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak dan memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- 3) Adanya dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak; dan
- 4) Adanya dukungan dari institusi vertikal.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- 1) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan;
- 2) Optimalisasi fungsi UPTD PPA;
- 3) Pengembangan Kabupaten Tabalong menuju Kota Layak Anak, dan
- 4) Percepatan penurunan Stunting.

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerinthan Daerah Kabupaten Tabalong RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana semuanya sudah sesuai dengan Rencana Strategis dan RKPD untuk program dan kegiatannya.



Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tabalong	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,413 Indeks	798.179.293	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Tabalong	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,413 Indeks	1.399.870.489	
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	28 %				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	28 %		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	61,63%				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	61,63%		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			221.926.053	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			283.271.236	
	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	91 Lembaga	221.926.053	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	91 Lembaga	283.271.236	Penambahan pagu sebesar Rp. 61.345.183,-
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			160.778.610	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			308.491.217	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam	Tabalong	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi	5 Lembaga	62.899.980	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam	Tabalong	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi	5 Lembaga	180.000.000	Penambahan pagu sebesar Rp. 117.100.020,-



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		dalam rangka peningkatan partisipasi 53erempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		dalam rangka peningkatan partisipasi 53erempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi			
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah SDM 53erempu 53erempuan53 dan 53erempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan 53erempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	160 Orang	97.878.630	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah SDM 53erempu 53erempuan53 dan 53erempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan 53erempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	160 Orang	128.491.217	Penambahan Pagu sebesar Rp. 27.612.587,-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			415.474.630	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			808.108.036	
	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah 53erempu penyedia layanan pemberdayaan 53erempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	317.596.000	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah 53erempu penyedia layanan pemberdayaan 53erempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	411.861.903	Penambahan Pagu sebesar Rp. 94.265.903,-
	Penguatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	97.878.630	Penguatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	396.246.133	Penambahan Pagu sebesar Rp. 298.367.503,-
	Program Perlindungan Perempuan	Tabalong	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100%	282.383.093	Program Perlindungan Perempuan	Tabalong	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100%	527.108.779	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			175.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			286.515.226	



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjasama Para Pihak dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	175.000.000	Kerjasama Para Pihak dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	286.515.226	Penambahan Pagu sebesar Rp. 111.515.226,-
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			12.383.093	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			127.457.553	
	Layanan Pengadua atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	12.383.093	Layanan Pengadua atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	20 Orang	127.457.553	Penambahan Pagu sebesar Rp. 115.074.460,-
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			95.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			113.136.000	
	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah 54 lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	40 Orang	95.000.000	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tabalong	jumlah 54 lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	40 Orang	113.136.000	Penambahan Pagu sebesar Rp. 18.136.000,-
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tabalong	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100%	252.061.475	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tabalong	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100%	736.806.292	
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan	Tabalong			182.005.312	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan	Tabalong			280.281.037	



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provisni dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Daeah yang ditetapkan oleh Pemerintah	Tabalong	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	125.189.668	Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provisni dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Daeah yang ditetapkan oleh Pemerintah	Tabalong	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	179.354.612	Penambahan Pagu sebesar Rp. 54.164.944
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	56.815.644	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	1 Dokumen	100.926.425	Penambahan Pagu sebesar Rp. 44.110.781
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	Tabalong			70.056.163	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang	Tabalong			456.525.255	



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Lembaga	70.056.163	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Lembaga	456.525.255	Penambahan Pagu sebesar Rp.386.469.092,-
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tabalong	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100%	145.131.871	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tabalong	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100%	185.167.454	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			145.131.871	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			185.167.454	
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	145.131.871	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota	Tabalong	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	185.167.454	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 40.035.583,-
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tabalong	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	62 Indeks	616.449.165	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tabalong	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	62 Indeks	1.027.204.608	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			175.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			294.589.008	
	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Tabalong	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan	12 Lembaga	175.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Tabalong	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi	12 Lembaga	294.589.008	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 119.589.008,-



No	Rancangan Awal RKPd 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			441.449.165	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong			732.615.600	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	jumlah SDM 57 lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	240 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	jumlah SDM 57 lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	240 Orang	359.479.412	Penambahan Pagu sebesar Rp. 159.479.412,-
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	241.449.165	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	373.136.188	Penambahan Pagu sebesar Rp. 131.687.023,-
	Program Perlindungan Khusus Anak	Tabalong	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,7	122.210.461	Program Perlindungan Khusus Anak	Tabalong	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,7	395.949.091	
			Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100%				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan	100%		



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
								Layanan Komprehensif (%)			
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			80.000.000	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota	Tabalong			224.330.020	
	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	80.000.000	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tabalong	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	1 Kegiatan	224.330.020	Penambahan Pagu sebesar Rp. 144.330.020,-
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			42.210.461	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			171.619.071	
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tabalong	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	47 Orang	42.210.461	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tabalong	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	47 Orang	171.619.071	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 129.408.610,-
	Program Pengendalian Penduduk	Tabalong	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10.3 %	229.050.792	Program Pengendalian Penduduk	Tabalong	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10.3 %	754.771.840	
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14.4 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14.4 Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun		



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
			Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2.17 Angka				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2.17 Angka		
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tabalong			99.795.792	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tabalong			341.694.440	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Tabalong	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kegiatan	84.795.792	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Tabalong	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kegiatan	317.961.360	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 233.165.568,-
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Tabalong	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	15.000.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Tabalong	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	23.733.080	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 8.733.080,-
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			129.255.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			413.077.400	
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tabalong	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	75.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tabalong	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	278.822.400	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 203.822.400,-



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Tabalong	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	9.755.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Tabalong	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	12 Laporan	9.755.000	
	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Tabalong	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	44.500.000	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Tabalong	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	124.500.000	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 80.000.000,-
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Tabalong	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	90.75 %	1.744.443.980	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Tabalong	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	90.75 %	1.794.206.846	
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	79.55 Angka				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	79.55 Angka		
			Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	3.89 %				Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	3.89 %		
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tabalong			160.413.980	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tabalong			184.042.032	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tabalong	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	160.413.980	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tabalong	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	184.042.032	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 23.628.052,-



No	Rancangan Awal RKPd 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tabalong			1.150.640.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tabalong			985.280.114	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tabalong	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	950 Orang	1.150.640.000	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tabalong	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	950 Orang	985.280.114	Pengurangan Pagu Sebesar Rp. 165.359.886,-
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			433.390.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong			624.884.700	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tabalong	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	952 Orang	234.890.000	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tabalong	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	952 Orang	368.031.650	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 133.141.650,-
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tabalong	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	198.500.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tabalong	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	256.853.050	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 58.353.050,-
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tabalong	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	67.5 Indeks	134.065.000	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Tabalong	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	67.5 Indeks	290.453.317	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88.85 Indeks				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88.85 Indeks		
			Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	100 %				Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	100 %		
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Tabalong			92.500.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Tabalong			222.221.650	



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	92.500.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	222.221.650	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 129.721.650,-
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong			41.565.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong			68.231.667	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	41.565.000	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Tabalong	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	68.231.667	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 26.666.667,-
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	7.869.525.870	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tabalong	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	10.541.282.695	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tabalong			150.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tabalong			127.012.217	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	14 Laporan	142.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	14 Laporan	119.012.108	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 22.987.892,-



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral daerah	Tabalong	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	5.000.079	Penyesuaian Pagu Sebesar Rp. 79,-
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Tabalong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	3.000.000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral daerah	Tabalong	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	3.000.030	Penyesuaian Pagu Sebesar Rp. 30,-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tabalong			5.783.508.527	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tabalong			6.540.423.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tabalong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	5.783.508.527	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tabalong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ Bulan	6.540.423.000	Penyesuaian Pagu sesuai Jumlah ASN dan PPPK DP3AP2KB sebanyak 27 Orang sebesar Rp. 756.914.473,-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tabalong			35.940.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tabalong			27.435.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tabalong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	35.940.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tabalong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	27.435.000	Pengurangan Pagu Sebesar Rp. 8.505.000,-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tabalong			571.931.742	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tabalong			583.306.416	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	151.931.742	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tabalong	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	98.370.201	Pengurangan Pagu Sebesar Rp. 53.561.541,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tabalong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.858.215	Pengurangan Pagu Sebesar Rp. 3.141.785,-



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	395.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tabalong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	114 Laporan	463.078.000	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 68.078.000,-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong			133.988.287	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong			333.525.372	
	Pengadaan Mebel	Tabalong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	70.528.999	Pengadaan Mebel	Tabalong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit	194.591.723	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 124.062.724
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	63.459.288	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.933.649	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 75.474.361,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong			637.761.769	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong			1.462.187.100	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.166.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	142.160.000	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 37.994.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	533.595.769	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tabalong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.320.027.100	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 786.431.331,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong			556.395.545	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tabalong			1.467.393.590	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tabalong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	411.270.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tabalong	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39 Unit	426.840.000	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 15.570.000,-



No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan 2026					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	285	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	33.960.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tabalong	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit	24.940.000	Pengurangan Pagu Sebesar Rp. 9.020.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tabalong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	111.165.545	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tabalong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.015.613.590	Penambahan Pagu Sebesar Rp. 904.448.045,-
	Jumlah				12.193.501.000					17.652.821.411	



E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun, merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang hanya diinginkan oleh perangkat daerah.

Untuk itu kualitas dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong merupakan hasil rumusan perencanaan yang dimulai dari tingkat Desa hingga tingkat kota. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau megaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong dalam proses kegiatan Musrenbang dan selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong didiskusikan dalam pembahasan forum perangkat daerah Kota secara :

1. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
2. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
3. Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal;
4. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;



5. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
6. Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
7. Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
8. Berekeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
9. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa haru menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia;
10. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pembahasan dilakukan untuk menyeleraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan. Pada forum OPD ada beberapa usulan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari kelompok masyarakat. Dari beberapa usulan masyarakat tidak semuanya dapat disetujui oleh OPD dengan alasan :

1. Jika permohonan itu sumber dananya adalah DAK maka pelaksanaannya harus sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang keluarnya setelah pelaksanaan Musrenbang.
2. Jika bantuan yang diajukan ternyata tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka akan dialihkan pada OPD yang menangani.

Secara terinci usulan program dan kegiatan untuk tahun 2026 dari pemangku kepentingan dan Masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang adalah :



Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

No	Uraian Usulan	Program/ Kegiatan/. Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Besaran/Volume	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pelatihan Ibu-ibu PKK, supaya ada kegiatan ibu-ibu rumah tangga	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Argumulyo Kecamatan Bintang Ara Rt. 01 Kabupaten Tabalong	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,413 Indeks	
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	28%	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	61,63%	
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga Sistem Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Perempuan yang Lebih Efektif dan Resposif	100%	
	Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Pendampingan	5 Lembaga			



BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan Nasional dan Provinsi untuk Pemberdayaan Perempuan diharapkan meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi serta kesetaraan upah. Kemudian untuk Perlindungan Anak diharapkan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan terhadap anak. Dalam rangka Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kualitas Penduduk diperlukan peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB). Kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang telah tertuang dalam kebijakan nasional sudah dituangkan dalam kebijakan pemerintah daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 01/Meneg-PP/V/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI yang diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 02/Meneg.PP/IX/2007, Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

B. Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD

Adapun tujuan dari Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga.

Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
3. Meningkatnya Keluarga Sejahtera (KS);
4. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.



Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

No.	PRIORITAS DAERAH	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD (OUTCOME)
1	2	3	4	5	5
1.	Menciptakan Masyarakat yang Berkarakter Kuat, Berakhlak Mulia dan Hidup dalam Harmoni	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkanya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah



Tabel 3.2

Tujuan

**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana**

NO	TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET KINERJA SKPD TAHUN 2026
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,97 Indeks
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	65,0 Indeks
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,10 Indeks

Tabel 3.3

**Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET KINERJA SKPD TAHUN 2026
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	630-650 Nilai
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak	650 Nilai
3.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	71,3 Indeks
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB



Tabel 3.4

**Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA 2026
1	2	3	4
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	640-650
2.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	650
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	71,3
4.	Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62 Indeks
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	83,7 Indeks
		Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%
5.	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,413 Indeks
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	28 %
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	61,63%
		Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Beperspektif Gender dan Hak Anak sesuai Standar	100%
		Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%
6.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	10,3 %
		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14,4 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun
		Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/ TFR)	2,17 Angka
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	90,75%
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	79,55 Angka
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	3,89%



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA IKU	TARGET KINERJA 2026
1	2	3	4
7.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100%



Tabel 3.5
Sasaran, Program dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

No.	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
1.	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/kota
		Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga
		Kegiatan Peningkatan kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Kabupaten/ Kota
		Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
		Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		



No.	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
		Sub Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Kegiatan Pengumpulan, pengolahan Analisis dan Penyejian Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup daerah Kabupaten/kota Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinas Kewenangan Kabupaten/kota Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Program Pemenuhan Hak Anak Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Program Perlindungan Khusus Anak Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/kota Sub Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota



No.	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
		Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
3.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera	Program Pengendalian Penduduk
		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Ranka Pengendalian Penduduk
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana
		Sub kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP.MTS, serta Jalur Nonformal dan Informasi
		Kegiatan Pemetaan Perkiraan Oengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana
		Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal
		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
		Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
		Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



No.	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
		<p>Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS< PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</p> <p>Kegiatan Pelaksanaan dan peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga</p>
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</p> <p>Kegiatan Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</p> <p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Mebel</p> <p>Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya</p>



No.	Sasaran SKPD	Nama Program / Kegiatan
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong.



Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak dan Kualitas Keluarga				Indeks Pembangunan Gender (IPG)		86,97 Indeks		86,97 Indeks			
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)		65,3 Indeks		65,6 Indeks			
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		67,25 Indeks		67,4 Indeks			
	Meningkatnya Pembangunan Gender dan Kesetaraan Gender			Nilai Pengaugerahan Parahita Ekapraya Daerah		650-670 Nilai	2.321.844.235	670-700 Nilai	2.595.329.000		
		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	0,413 Indeks	1.399.870.489	0,408 Indeks	1.448.836.100	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	52,38%	28 %		31 %			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	60,52%	61,63%		62,75 %			
		2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				283.271.236		361.328.320	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
		2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	-	91 Lembaga	283.271.236	116 Lembaga	361.328.320		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				308.491.217		564.022.300	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
		2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	-	5 Lembaga	180.000.000	5 Lembaga	266.998.315		
		2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM Lembaga Masyarakat dan Perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	-	160 Orang	128.491.217	160 Orang	297.023.985		
		2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				808.108.036		523.485.480	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
		2.08.02.2.03.0007	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perempuan penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	5 Lembaga	5 Lembaga	411.861.903	5 Lembaga	319.030.895		
		2.08.02.2.03.0008	Penguatan Kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen	396.246.133	1 Dokumen	204.454.585		
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif	100%	100%	736.806.292	100%	902.779.200	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Gender dan Hak Anak Sesuai Standar							
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				280.281.037		610.067.175	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
		2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/Kota, sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	179.354.612	10 Orang	340.602.204		
		2.08.04.2.01.0007	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dalam Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan 82aka nak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	-	1 Dokumen	100.926.425	1 Dokumen	269.464.971		
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak				456.525.255		292.712.025	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota								
		2.08.04.2.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-	6 Lembaga	456.525.255	12 Lembaga	292.712.025		
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	185.167.454	100%	243.713.700	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				185.167.454		243.713.700	Bidang Pemberdayaan Perempuan	Tabalong
		2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	185.167.454	1 Dokumen	243.713.700		
	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak			Nilai dalam Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)		725 Nilai	1.950.262.478	750 nilai	2.193.465.000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA	Tabalong
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%	527.108.779	100%	605.722.700	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA	Tabalong
		2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				286.515.226		278.952.044	Bidang Perlindungan	Tabalong



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
										Perempuan dan Anak	
		2.08.03.2.01.0004	Kerjasama Para Pihak dalam Pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	286.515.226	1 Dokumen	278.952.044		
		2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				127.457.553		169.013.797	UPTD PPA	Tabalong
		2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	16 Orang	20 orang	127.457.553	21 Orang	169.013.797		
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				113.136.000		157.756.859	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tabalong
		2.08.03.2.03.0007	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	-	40 Orang	113.136.000	45 Orang	157.756.859		
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60,97 Indeks	62 Indeks	1.027.204.608	63 Indeks	1.146.632.000	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tabalong
		2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				294.589.008		335.985.017	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tabalong



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	12 Lembaga	294.589.008	12 Lembaga	335.985.017		
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				732.615.600		810.646.983	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tabalong
		2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	240 Orang	240 Orang	359.479.412	240 Orang	350.307.855		
		2.08.06.2.02.0008	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	1 Laporan	373.136.188	1 Laporan	460.339.128		
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	83,52 Indeks	83,7 Indeks	395.949.091	88,8 Indeks	441.110.300	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA	Tabalong
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100%	100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				224.330.020		230.088.769	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Tabalong
		2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan KtA Kepada Pengambil Kebijakan dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	-	1 Kegiatan	224.330.020	1 Kegiatan	230.088.769		
		2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				171.619.071		211.021.531	UPTD PPA	Tabalong
		2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	45 Orang	47 Orang	171.619.071	47 Orang	211.021.531		
	Meningkatnya Keluarga Sejahtera			Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		71,8 Indeks	2.839.432.003	72 Indeks	3.268.803.500		
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Kehamilan Tidak direncanakan (KTD)	10,3 %	10,3 %	754.771.840	10,2 %	899.591.900	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Sistem Informasi Keluarga	Tabalong
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	14,4 Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			14 Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,17 Angka			2,16 Angka			
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				341.694.440		368.542.740	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Sistem Informasi Keluarga	Tabalong
		2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kegiatan	10 Kegiatan	317.961.360	10 Kegiatan	234.071.040		
		2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	23.733.080	1 Satuan Pendidikan	134.471.700		
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Cakupan Penduduk Daerah Kabupaten/Kota				413.077.400		531.049.160	Bidang Pengendalian Penduduk Dan Sistem Informasi Keluarga	Tabalong
		2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	278.822.400	12 Dokumen	212.652.262		
		2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan	12 Laporan	12 Laporan	9.755.000	12 Laporan	144.957.324		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
				pengawasan Program Bangsa Kencana							
		2.14.02.2.02.0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	3 Dokumen	3 Dokumen	124.500.000	3 Dokumen	173.439.574		
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern	90,7 %	90,75%	1.794.206.846	90,8%	2.051.226.000	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	79,32 Angka	79,55 Angka		79,6 Angka			
				Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	4,79 %	3,89%		3,43 %			
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				184.042.032		159.783.895	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong
		2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	184.042.032	1 Dokumen	159.783.895		
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB 9PKB/PLKB)				985.280.114		1.100.078.620	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan	Tabalong



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
										Kesejahteraan Keluarga	
		2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	938 Orang	950 Orang	985.280.114	950 Orang	1.100.078.620		
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				624.884.700		791.363.485	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong
		2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.500 Orang	952 Orang	368.031.650	1.000 Orang	387.783.293		
		2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	5 Unit	256.853.050	5 Unit	403.580.192		
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Indeks Lansia Berdaya	67,3 Indeks	67,5 Indeks	290.453.317	67,55 Indeks	317.985.600	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	88,8 Indeks	88,85 Indeks		88,9 Indeks			
				Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	100%	100%		100%			
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				222.221.650		186.772.800	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong
		2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok	12 Laporan	1 Laporan	222.221.650	1 Laporan	186.772.800		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				68.231.667		131.212.800	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tabalong
		2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	68.231.667	1 Laporan	131.212.800		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB	BB	10.541.282.695		11.286.315.300		
		2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan terhadap Pelayanan Kesekratariatan	100%	100 %	10.541.282.695	100%	11.286.315.300	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				127.012.217		404.164.364	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	1 Laporan	119.012.108	1 Laporan	263.255.037		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	1 Dokumen	5.000.079	1 Dokumen	70.004.689		
		2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	4 Data	3.000.030	4 Data	70.904.638		
		2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.540.423.000		6.518.803.000	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	35 Orang/Bulan	6.540.423.000	45 Orang/Bulan	6.518.803.000		
		2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				27.435.000		118.754.607	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 Paket	40 Paket	27.435.000	40 Paket	118.754.607		
		2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				583.306.416		1.080.583.225	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	50 Paket	98.370.201	50 Paket	275.165.936		
		2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	21.858.215	10 Paket	184.705.732		
		2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan	90 Laporan	463.078.000	90 Laporan	620.711.557		
		2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				333.525.372		502.059.392	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10 Unit	194.591.723	12 Unit	238.554.785		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	6 unit	138.933.649	8 Unit	263.504.607		
		2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.462.187.100		1.502.624.391	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	142.160.000	12 Laporan	263.022.607		
		2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.320.027.100	12 Laporan	1.239.601.784		
		2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.467.393.590		1.159.326.321	Sekretariat	Tabalong
		2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	35 Unit	426.840.000	40 Unit	644.321.714		
		2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	52 Unit	24.940.000	52 Unit	110.004.607		
		2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1.015.613.590	1 Unit	405.000.000		
Jumlah							17.652.821.411		19.343.912.800		



BAB V PENUTUP

A. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan RKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/ rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2026, isu-isu strategis berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap



program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/ mempedomani RPJMD, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku.
5. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

C. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

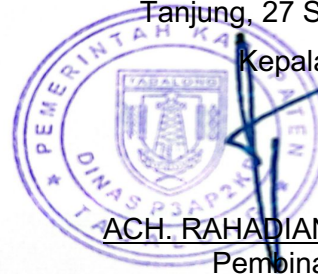
1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.
2. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang lebih terbuka dan bertanggung jawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.



Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Tanjung, 27 September 2025

Kepala Dinas,



ACH. RAHADIAN NOOR, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19780910 199711 1 001